

TESIS

**REKONSTRUKSI REGULASI KEOTENTIKAN
AKTA NOTARIS DALAM PENGGUNAAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA
PELAYANAN KENOTARIATAN DI
INDONESIA**



Diajukan Oleh :

**KARINAWATI
NIM.2420216320063**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juni 2026

**REKONSTRUKSI
REGULASI KEOTENTIKAN AKTA NOTARIS DALAM
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA
PELAYANAN KENOTARIATAN DI INDONESIA**

Tesis

**Untuk Memperoleh gelar Magister
Dalam Program Studi Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**KARINAWATI, S.H
2420216320063**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juni 2026

**Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal 23 juni 2026**

PEMBIMBING



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006**

**Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Koordinator Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002**

**Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 2003121001**

Tesis ini telah dipertahankan didepan
Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal 23 Juni 2026

Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karinawati, S.H
NIM : 2420216320063
Program studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin
Judul Tesis : REKONSTRUKSI REGULASI KEOTENTIKAN AKTA
NOTARIS DALAM PENGGUNAAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK PADA PELAYANAN KENOTARIATAN
DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 11 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Karinawati, S.H

NIM 2420216320063



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

KARINAWATI

NIM : 2420216320063

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**REKONSTRUKSI REGULASI KEOTENTIKAN AKTA NOTARIS DALAM
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN
KENOTARIATAN DI INDONESIA**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 13%
sesuai dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 22 Juni 2026

Mengetahui,
An. Dekan



Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

REKONSTRUKSI REGULASI KEOTENTIKAN AKTA NOTARIS DALAM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN KENOTARIATAN DI INDONESIA

Oleh :

Karinawati¹, Ifrani²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 113 halaman

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai bidang, termasuk dalam layanan hukum dan kenotariatan. Notaris memiliki peran yang sangat krusial sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, sistem kenotariatan di Indonesia sampai sekarang masih didominasi oleh metode konvensional. Prosedur seperti keharusan hadir secara fisik, pembacaan akta secara langsung, penggunaan tanda tangan basah, dan penyimpanan dokumen dalam bentuk kertas masih menjadi pilar utama. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya telah memberikan pengakuan hukum terhadap instrumen digital, seperti dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Ketidaksinkronan antara UU Jabatan Notaris yang masih mempertahankan prosedur konvensional dengan UU ITE yang sudah berbasis elektronik ini akhirnya memicu persoalan hukum. Akibatnya, muncul ketidakpastian mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara digital. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan pelayanan hukum yang cepat, efisien, dan bisa diakses secara daring. Kondisi inilah yang membuat pembaruan aturan kenotariatan menjadi sangat mendesak, agar hukum nasional mampu beradaptasi dengan era digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelarasan hukum antara sistem konvensional dan sistem digital dalam proses penandatanganan akta notaris. Selain itu, penelitian ini bermaksud merumuskan bentuk regulasi yang ideal terkait penerapan tanda tangan elektronik pada layanan kenotariatan di Indonesia pada masa mendatang. Penelitian ini juga berupaya memetakan berbagai hambatan aturan yang muncul akibat disharmonisasi antara hukum kenotariatan dan hukum teknologi informasi, sekaligus memberikan solusi hukum untuk menyatukan kedua sistem tersebut secara harmonis. Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum kenotariatan, hukum siber, dan hukum pembuktian elektronik dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Hasil analisis ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep *Cyber Notary* serta hubungan antara keaslian akta dengan pemanfaatan teknologi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah,

¹ 2420216320063

² Ifrani

pembuat undang-undang, organisasi profesi notaris, serta praktisi hukum dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap teknologi. Bagi para notaris, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menghadapi digitalisasi pelayanan dengan tetap menjaga keamanan data dan kepastian hukum masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan analisisnya pada kajian norma, asas, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Ada tiga pendekatan yang diterapkan untuk mengulas isu ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptional approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan aturan digunakan untuk memeriksa keselarasan antara UU Jabatan Notaris, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), beserta aturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual dipakai untuk mendalami konsep keotentikan akta, tanda tangan elektronik, wadah Cyber Notary, kepastian hukum, dan teori pembuktian sebagai dasar analisis. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan melihat sistem digitalisasi kenotariatan di Australia, Estonia, dan Amerika Serikat guna menemukan model regulasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan tersier sebagai pendukung. Semua bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif melalui penalaran hukum, penafsiran, dan harmonisasi norma untuk menghasilkan rekomendasi pembaruan yang tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi secara horizontal antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang ITE, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada akta notaris. Masalah utama terletak pada kewajiban para pihak untuk hadir secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang bertentangan dengan pengakuan tanda tangan elektronik dalam Pasal 11 UU ITE. Jika ditinjau dari teori pembuktian, sistem verifikasi digital, sertifikat elektronik, dan prinsip non-repudiation (anti-penyangkalan) sebenarnya sudah mampu menjalankan fungsi identifikasi, menjamin keaslian dokumen, dan menjadi bukti kesepakatan seperti halnya sistem konvensional. Namun, karena belum ada aturan yang tegas di dalam UUJN, akta yang dibuat secara elektronik berpotensi kehilangan sifat autentiknya. Di tingkat global, digitalisasi kenotariatan sudah berhasil diterapkan di beberapa negara, seperti melalui sistem audio visual witnessing di Australia, e-Notary di Estonia, dan Remote Online Notarization (RON) di Amerika Serikat. Berdasarkan perbandingan tersebut, riset ini merumuskan bahwa regulasi ideal Cyber Notary di Indonesia harus mencakup lima poin penting: pengakuan akta elektronik sebagai akta autentik, legalitas kehadiran virtual sebagai bentuk kehadiran hukum yang sah, mandatori penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi resmi, penguatan keamanan siber dan perlindungan data, serta integrasi dengan sistem administrasi hukum nasional. Oleh karena itu, pembaruan hukum kenotariatan menjadi kebutuhan yang mendesak agar sistem hukum Indonesia bisa mengikuti perkembangan teknologi sekaligus tetap melindungi hak-hak masyarakat.

REKONSTRUKSI REGULASI KEOTENTIKAN AKTA NOTARIS DALAM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN KENOTARIATAN DI INDONESIA

Oleh :

Karinawati¹, Ifrani²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 117 halaman

ABSTRAK

Kata kunci: keotentikan akta Notaris, tanda tangan elektronik, harmonisasi

Perkembangan digitalisasi pelayanan kenotariatan di Indonesia mendorong pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta Notaris, namun penerapannya menimbulkan persoalan hukum karena ketentuan kehadiran fisik para pihak dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum selaras dengan pengakuan keabsahan tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai keotentikan akta yang dibuat secara digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi hukum antara sistem konvensional dan sistem digital dalam penandatanganan akta Notaris, serta merumuskan rekonstruksi regulasi keotentikan akta Notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada pelayanan kenotariatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum, yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait syarat kehadiran para pihak, pembacaan akta, serta penggunaan tanda tangan elektronik dalam proses pembuatan akta autentik, sehingga berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian dan keotentikan akta Notaris yang dibuat secara elektronik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi mutlak diperlukan melalui pengaturan *cyber notary*, mekanisme *digital meeting* sebagai pengganti kehadiran fisik, verifikasi identitas elektronik, perlindungan data pribadi, serta pengakuan tanda tangan elektronik tersertifikasi, guna menjamin keotentikan akta Notaris dan mewujudkan kepastian hukum dalam pelayanan kenotariatan di era digital.

¹ 2420216320063

² Ifrani

RECONSTRUCTION OF REGULATIONS ON THE AUTHENTICITY OF NOTARIAL DEEDS IN THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES IN NOTARIAL SERVICES IN INDONESIA

By:

Karinawati¹, Ifrani²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 117 pages

ABSTRACT

Keywords: authenticity of notarial deeds, electronic signatures, harmonization

The development of digitalization in notarial services in Indonesia has driven the use of electronic signatures in the making of notarial deeds, however, its implementation raises legal issues because the requirement for the physical presence of the parties in the Notary Profession Act is not yet in conformity with with the recognition of the validity of electronic signatures in the Electronic Information and Transactions Act, thereby creating uncertainty regarding the authenticity of digitally made deeds. This study is aimed at analyzing the legal synchronization between conventional and digital systems in the signing of notarial deeds, as well as formulating a regulatory reconstruction for the authenticity of notarial deeds in the use of electronic signatures in notarial services in Indonesia.

This study is a normative legal research employing a statute approach and conceptual approach, and a comparative approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed prescriptively. The results of the study indicate a disharmony between the Notary Profession Act and Electronic Information and Transactions Act regarding the requirements for the presence of the parties, the reading out of deeds, and the use of electronic signatures in the making process of authentic deeds. Based on the said finding, this research concludes that harmonization of regulation is absolutely needed through cyber notary regulation, mechanism of digital meeting as replacement of physical attendance, verification of identitas electronic identity, personal data protection, and recognition of certified electronic in order to guarantee the authenticity of notarial deeds and to actualize legal certainty in notarial services in digital era.

Certified by,



¹ Student Number: 2420216320063

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya **H. Andi Syarifuddin** dan **Hj. Sarinawati**, yang telah merawat, menjaga dan mendidik saya dengan sepenuh hati hingga menjadikan saya seperti sekarang ini. Berkat kasih sayang dan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti menyertai saya untuk menuju kesuksesan dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada saya yang mana tidak akan dapat bisa terbalaskan, hanya doa tulus yang dapat saya berikan semoga ayahanda dan ibunda selalu bahagia dan selalu dalam lindungan-nya.

Kakek dan Nenek terkasih,

Penulis ucapkan terima kasih dan mempersembahkan Tesis sederhana ini untuk orang yang selalu mendoakan dan sangat mengharapkan kelulusan ini. Teruntuk kakek saya **H. Udin Daeng Masennang (alm)** dan **Hj. Hamidah**, skripsi ini tidak seberapa untuk membalaskan segala yang telah kalian berikan.

Kakak dan Adik tersayang,

Di ucapkan terima kasih kepada kakak penulis **Muhammad Akbar** dan **Arvina Damayanti**, dan adik **Andi Nadia Ulyah** dan **Andi Bambang Sarif Mario**, dan keponakan kesayangan **Aghnia Khansa Zaida** atas segala doa, dorongan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.

Dosen pembimbing tesis

Terima kasih sebesar-besarnya kepada **bapak Prof. Dr. Irfani, S.H., M.H.** Atas segala ilmu, bimbingan dan nasehat selama ini, hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu sesuai dengan harapan dan keinginan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan berkat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan lancar. Penulis mengambil judul : **REKONSTRUKSI REGULASI KEOTENTIKAN AKTA NOTARIS DALAM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN KENOTARIATAN DI INDONESIA**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati segala penghargaan dan salam terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta dorongan selama ini :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan sebagai Dosen Penguji 1 yang memberikan masukan dan kritik yang membangun selama sidang tesis.
3. Bapak Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Kedua Orang Tua Penulis, ayah tersayang H. Andi Syarifuddin, dan Ibu tercinta Hj. Sarinawati, yang menjadi motivasi serta senantiasa selalu memberikan bantuan, dorongan dan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Saudara dan keluarga tersayang yang selalu mendoakan, setia mendampingi, mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.
8. Sahabat, Aulia Defitri Wulandari, S.Si., M.Si, Nana Istiana, S.H., M.Kn., dan Nur Syifa Islamiya Effendi, S.H., M.Kn yang telah membantu dan kebersamaan sejak awal, dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan serta dorongan sehingga penyusunan tesis ini selesai tepat waktu.
9. Sahabat Penulis *since day one* Cherybelle, Cinta Damai Grub dan teman-teman Penulis dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat yang selalu saling memberikan bantuan serta dukungan selama di perkuliahan serta saat proses penyusunan tesis sampai dengan selesai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.
10. *Last but not least!!!* Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu bertahan dari tekanan di luar keadaan dan tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan tesis ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri, u did it karin.

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan tentunya menjadi kebanggaan terutama untuk diri saya sendiri. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan tidak kesempurnaan di dalam penelitian tesis ini, untuk penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang

Banjarmasin, 11 Juni 2026

Penulis

Karinawati, S.H.

NIM. 2420216320063

DAFTAR ISI	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iii
PERNYATAAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	iv
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN.....	x
UCAPAN TERIMAS KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
1. Kerangka Teoritis	14
2. Kerangka Konseptual	21
F. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	36
2. Tipe Penelitian	37
3. Sifat Penelitian.....	37
4. Pendekatan Penelitian	38
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	40
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	41
BAB II SINKRONISASI HUKUM ANTARA SISTEM KONVENSIONAL DENGAN SISTEM DIGITAL DALAM PENANDATANGAN AKTA NOTARIS.....	42
A. Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris.....	43
B. Sinkronisasi Hukum Antara Sistem Konvensional Dengan Sistem Digital	57

BAB III PENYUSUNAN REGULASI HUKUM DI ERA DIGITALISASI MENDATANG TERKAIT KEOTENTIKAN AKTA NOTARIS DALAM PENGEMBANGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA LAYANAN KENOTARIATAN DI INDONESIA	69
A. Perbandingan Hukum dalam Reformasi Digital Kenotariatan	70
B. Penyusunan Regulasi Hukum di Era Digitalisasi dalam Layanan Kenotariatan di Indonesia	101
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	